



# LAPORAN KINERJA

## TRIWULAN I 2023

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Triwulan I Tahun 2023 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, disamping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2023 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak.

LKj Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Pontianak dalam kurun waktu Triwulan I tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Pontianak dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat terus ditingkatkan.

Pontianak, 14 April 2023  
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak



Abdul Quddus

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja serta telah diintegrasikan dengan Balanced Scorecard (BSC). Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Stasiun PSDKP Pontianak kepada Direktur Jenderal PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Dalam perspektif BSC Stasiun PSDKP Pontianak telah menetapkan 7 Sasaran Strategis (SK), yaitu: <sup>(1)</sup> Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat; <sup>(2)</sup> Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; <sup>(3)</sup> Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; <sup>(4)</sup> Terselenggaranya Pemantauan dan operasi armada SDKP; <sup>(5)</sup> Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP; <sup>(6)</sup> Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan; <sup>(7)</sup> Tata kelola pemerintahan yang baik.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak.....	2
1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak.....	2
1.5 Sistematika Penyajian.....	7
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024.....	10
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	12
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023.....	17
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
1. IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas.....	271
2. IKU Indek kinerja Speed Boat Pengawas.....	344
3. IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%).....	27
4. IKU IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%).....	414
5. IKU Persentase penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan.....	418
6. Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.....	4341
7. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	45
8. IKM Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	45
9. IKM .Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	47

10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	50
11. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan....	52
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak dengan Satker UPT Sejenis/Setara.....	53
3.4. A kuntabilitas Keuangan .....	56
BAB 4 PENUTUP .....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Rekomendasi.....	59

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia .....	3
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023.....	14
Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	18
Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023.....	20
Tabel 5. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan I Tahun 2023 .....	293
Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas ..	29
Tabel 7. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan I Tahun 2023 .....	346
Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian Indeks operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	27
Tabel 9. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi .....	28
Tabel 10. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan destructive fishing .....	29
Tabel 11. Pengawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut .....	35
Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I tahun 2020-2024 .....	36
Tabel 13. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat triwulan I .....	375
Tabel 14. Rekapitulasi Pelaku usaha unit usaha pembudidayaan ikan .....	376
Tabel 15. Tahapan pemeriksaan Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan dan pemasaran ikan .....	37
Tabel 16. Rekapitulasi Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil .....	37
Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	388
Tabel 18. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	40
Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak ..	41
Tabel 20. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	43
Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	45
Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	47

Tabel 23. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	49
Tabel 24. Perbandingan Target dan Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	45
Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak .....	52
Tabel 26. Tabel 26. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan.....	52
Tabel 27. Rincian Realisasi Anggaran .....	47
Tabel 28. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil capaian.....	59

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak .....	3
Gambar 2. Wilayah Kerja .....	6
Gambar 3. Peta Strategi .....	13
Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak TW I Tahun 2023....	17
Gambar 5. Perhitungan SKM SLO .....	45
Gambar 6. Perhitungan SKM LVHPI .....	47
Gambar 7. Capaian IK unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perjanjian Kinerja tahun 2023.....	60

### **1.1 Latar Belakang**

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Permen KP Nomor 33 Tahun 2016 Tentang OTK UPT PSDKP di Bidang Pengawas

an Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fungsi sebagai berikut: <sup>(1)</sup> Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; <sup>(2)</sup> Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(3)</sup> Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(4)</sup> Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; <sup>(5)</sup> Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan; <sup>(6)</sup> Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas; serta <sup>(7)</sup> Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Peningkatan peran pengawasan terus dilakukan, salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja pengawasan SDKP dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus kegiatan Stasiun PSDKP Pontianak untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (sebagai eselon 1 yang menaungi) dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap triwulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

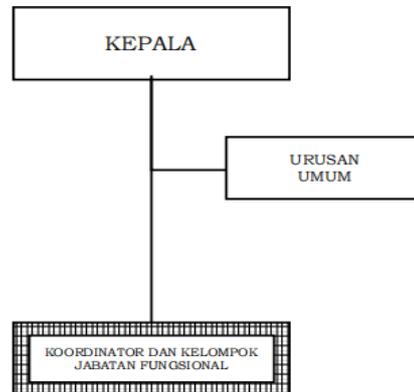
## 1.3 Isu Aktual Pengawasan Stasiun PSDKP Pontianak

- Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi yang digunakan
- Penanganan awak kapal (tersangka) dan barang bukti kapal yang ditinggalkan oleh pihak kejaksaan khususnya perkara dalam proses banding/kasasi
- Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII)
- Pemanfaatan Jenis ikan yang dilindungi dan/ atau apendiks CITES yang tidak patuh dengan peraturan yang berlaku
- Perusakan terumbu karang akibat penambangan dan akibat penggunaan alat tangkap yang dilarang
- Kegiatan yang mencemari perairan pesisir dan laut

## 1.4 Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Pontianak

Kedudukan UPT. Stasiun PSDKP Pontianak dipimpin oleh Seorang Kepala setingkat Eselon IVa yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan

STRUKTUR ORGANISASI  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Pontianak

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan SDKP;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan SDKP;
5. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
6. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### **SDM Pengawasan**

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Stasiun PSDKP Pontianak pada Tahun 2023 total adalah 82 orang yang tersebar di UPT Satwas/Wilker dan Kapal Pengawas. Dari total 81 orang Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) tersebut, 31 orang adalah Pengawas Perikanan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEP-DJPSDKP/2017 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia

No	Unit Kerja	Jumlah SDM											
		S T	ST+ PP	F U	FU+ PP	FU+ PO	F P P	FPP +P O	FPP +PP	FPP +P O+ PP	J F T	P D	Jum lah
1	UPT Stasiun PSDKP Pontianak		1	7	1		4	1	3	2	2		21
2	Satwas PSDKP Sambas			1			1	2					4
3	Satwas PSDKP Kayong Utara			4			1			1			6
4	Satwas PSDKP Kota Waringin Barat			2					2				4
5	Wilker PSDKP Sungai Rengas			2		1							3
6	Wilker PSDKP Sungai Kakap												0
7	Wilker PSDKP Mempawah			1									1
8	Wilker PSDKP Entikong					1							1
9	Wilker PSDKP Badau			2						1			3
10	Wilker PSDKP Singkawang							1	1				2
11	Wilker PSDKP Sajingan			1	1								2
12	Wilker PSDKP Jagoi Babang			2									2
13	Wilker PSDKP Ketapang			3			1						4
14	Wilker PSDKP Seruyan			2									2
15	KP. Hiu Macan 01			14	1								15
16	KP. Hiu 11			10	1								11
<b>Jumlah Total</b>												<b>81</b>	

Keterangan :

ST = Struktural

PP = PPNS

FU = Fungsional Umum

PO = Polsus PWP3K

FPP = Fungsional Pengawas Perikanan

PD = Pegawai Dinas

## Bangunan Pengawasan

Sarana dan prasarana yang terdapat di Wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak antara lain:

### a. Gedung Kantor Pengawasan

Gedung kantor pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang sudah menjadi aset sendiri (terdaftar dalam BMN) antara lain:

1. Kantor Stasiun PSDKP Pontianak (600 M<sup>2</sup>)
2. Kantor Satwas PSDKP Sambas
3. Kantor Satwas PSDKP Kayong Utara
4. Kantor Satwas PSDKP Kotawaringin Barat
5. Kantor Wilker PSDKP Entikong
6. Kantor Wilker PSDKP Ketapang

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sampai Tahun 2023 terdapat beberapa Satwas/Wilker yang masih belum dibangun sehingga pihak Stasiun PSDKP Pontianak berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten setempat yang terkait dengan Perikanan dan Kelautan untuk pinjam pakai kantor gedung atau ruangan yang digunakan sebagai kantor pengawasan, Satwas/Wilker PSDKP yang dimaksud adalah Wilker PSDKP Sungai Kakap, Wilker PSDKP Sungai Rengas, Wilker PSDKP Mempawah, Wilker PSDKP Singkawang, Wilker PSDKP Jagoi Babang, dan Wilker PSDKP Seruyan. Sedangkan kantor Wilker PSDKP Sajingan dan Wilker PSDKP Badau, statusnya sampai dengan saat ini adalah menyewa rumah milik masyarakat setempat yang difungsikan sebagai kantor pengawasan.

### b. *Detention Centre* (DTC)

Detention Center terdapat di Stasiun PSDKP Pontianak digunakan sebagai tempat penampungan sementara awak kapal penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan kapasitas maksimal 160 orang.

### c. Dermaga

Dermaga berada di Stasiun PSDKP Pontianak dengan panjang ±100M dan lebar 4M yang digunakan untuk sandar Kapal Pengawas dan digunakan untuk pemeriksaan kapal yang baru diadhock.

### d. Gedung Penyimpanan Barang Bukti

Gedung Penyimpanan Barang Bukti terdapat di Pontianak yang digunakan untuk penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan berukuran 40 M<sup>2</sup>

e. Mess Operator

Difungsikan untuk tempat tinggal para Pegawai Negeri Sipil yang standby dan selalu siap siaga di Stasiun PSDKP Pontianak dengan jumlah 8 unit

f. Mess AKP

Difungsikan untuk tempat istirahat bagi Awak Kapal Pengawas dengan jumlah 15 kamar dimana setiap kamar maksimal dihuni oleh 4 orang

g. Kolam Labuh

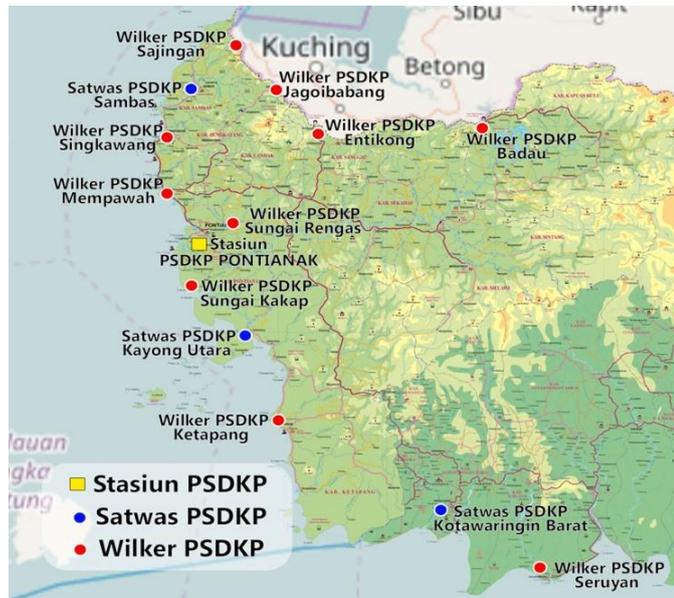
Difungsikan sebagai tempat labuh kapal kapal hasil pengananan TPP dengan luasan 4.800 M<sup>2</sup>

### Kapal Pengawas

Stasiun PSDKP Pontianak sampai saat ini mengelola 2 unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu Macan 01 dan KP. Hiu 11 dan 5 unit Speed Boat Pengawasan yang penempatannya dialokasikan pada Stasiun PSDKP Pontianak (2 unit), Satwas PSDKP Kayong Utara (1 unit), Wilker PSDKP Kapuas Hulu (1 unit), dan Satwas PSDKP Sambas (1 unit).

### Satwas dan Wilker Pengawasan

Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Pontianak tersebar di 2 provinsi yaitu Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, adapun peta wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak dapat dilihat pada Gambar 2. berikut ini:



Gambar 2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah WPP 711 dan 712, merupakan daerah *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Seiring dengan terjadinya pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan per Tanggal 28 Desember 2020 maka wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak berubah menjadi 3 Satwas dan 10 Wilker Pengawasan, yaitu:

- Satwas PSDKP Sambas;
- Satwas PSDKP Kayong Utara;
- Satwas PSDKP Kotawaringin Barat;
- Wilker PSDKP Sungai Rengas;
- Wilker PSDKP Sungai Kakap;
- Wilker PSDKP Mempawah;
- Wilker PSDKP Entikong;
- Wilker PSDKP Kapuas Hulu;
- Wilker PSDKP Singkawang;
- Wilker PSDKP Sajingan;
- Wilker PSDKP Jagoi Babang;
- Wilker PSDKP Ketapang
- Wilker PSDKP Seruyan.

### **1.5 Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada Tahun 2023. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan capaian. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **B. Evaluasi dan Analisis**

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari : Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2023, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023.

### **2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024**

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu logical model yang utamanya gunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja. Pada pendekatan logical model, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (impact), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (Outcome), dan sasaran kegiatan (unit eselon II)

yang menghasilkan keluaran (output). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu :

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

## **2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PSDKP Pontianak disusun berdasarkan turunan tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2020–2024. Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2023 adalah manifestasi dari Rencana Kerja Tahunan untuk mengukur target dan capaian kinerja. RKT Stasiun Pengawasan PSDKP Pontianak berisikan program kegiatan:

### **A. Pemantauan dan Operasional Armada;**

1. Operasional Kapal Pengawas
2. Kapal Perikanan yang Diperiksa Kapal Pengawas
3. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Kapal Pengawas
4. Awak Kapal yang Memperoleh Kesehatan Rutin Tahunan
5. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan Yang Siap Operasi
6. Kesiapan Sistem Pemantauan SDKP
7. Operasional Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
8. Kapal Perikanan yang Diperiksa Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
9. Cakupan WPPNRI yang Dipantau Menggunakan Speed Boat/ Rigid Inflatable boat/ Rubber Boat
10. Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS
11. Bangunan/ Pos Pengawasan yang dibangun
12. Speed Boat Pengawasan yang dibangun

### **B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;**

1. Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

### **C. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;**

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

2. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
  3. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
  4. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing
- D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
  2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan
  3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
  4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
- E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya,
1. Layanan Sarana Dan Prasarana Internal
  2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
  3. Layanan Perkantoran

### **2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan <sup>(3)</sup> Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Pontianak yang optimal.

Stasiun PSDKP Pontianak telah menerima Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi kedalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Pontianak menggunakan 3 perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*), bukan sebagai unit kerja pendukung dalam BSC (*supporting unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Stasiun PSDKP Pontianak dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.



Gambar 3. Peta Strategi

Peta strategi Stasiun PSDKP Pontianak menerapkan 3 perspektif, yaitu: *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Customers perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*.

Sedangkan *Learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan.

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama *Balanced Score Card* (IKU BSC). Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b>				
1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80
2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,6
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6
3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	4	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
<b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>				
4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan	5	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (%)	100
<b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>				
5	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan	6	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (%)	100
<b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	7	Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	80
7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	8	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
<b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP</b>				
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	9	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		11	Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100
		13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	78
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	90
		15	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		16	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21
		17	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1
		18	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92
		19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	89
		22	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82

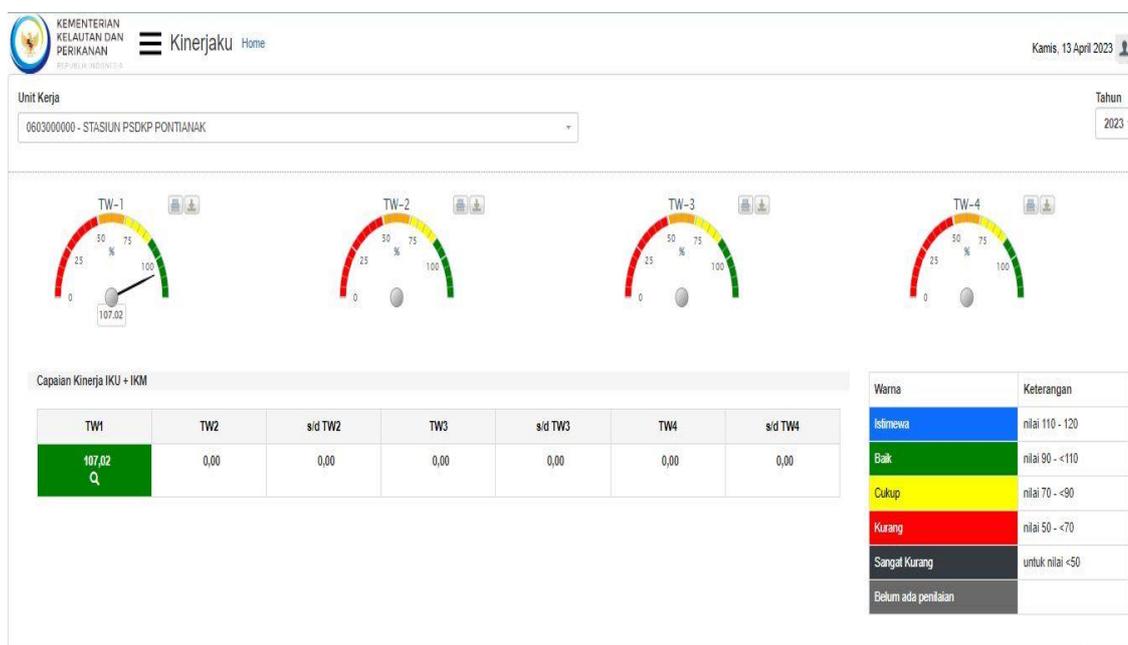
#### **2.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023**

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 yang didukung dengan implementasi aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus BSC berbasis informasi teknologi.

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Pontianak telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 22 Indikator Kinerja. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun PSDKP Pontianak yang terdiri dari IKU dan IKM sebesar 107,02%.



Sumber: SAPK ([kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id))

Gambar 4. Dashboard Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I Tahun 2023

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh hasil pengukuran IKU pada setiap Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	TARGET TW I	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80	-	-	-
2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	2	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,6	87,6	99,53	113,62
		3	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6	87,6	100	114,16
3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	4	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)	100	-	-	-
4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan	5	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (%)	100	100	100	100
5	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan	6	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (%)	100	100	100	100
6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	7	Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	80	40	60	120
7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	8	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93	40	40	100
8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	9	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80	80	91,08	113,85
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80	80	92,39	115,49
		11	Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75	-	-	-
		12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	100	100
		13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	78	-	-	-
		14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	90	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET TW I	REALISASI	%	
		15	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100
		16	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21	-	-	-
		17	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1	-	-	-
		18	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92	92	97,04	105,48
		19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5	-	-	-
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5	-	-	-
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	89	-	-	-
		22	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82	-	-	-

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Istimewa (nilai 110-120)
2		Baik ( nilai 90-<110)
3		Cukup (nilai 70 - <90)
4		Kurang (nilai 50 - <70)
5		Sangat Kurang (nilai < 50)
6		Belum Ada Penilaian

Penjelasan tentang capaian IKU pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selama periode Triwulan I Tahun 2023 Stasiun PSDKP Pontianak telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Terdapat 11 (Sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan target capaiannya. Evaluasi dan analisis terhadap capaian sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	TARGET TW I	REALISASI	%
1	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,6	87,6	99,53	113,62
		2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6	87,6	100	114,16
2	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan	3	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (%)	100	100	100	100
3	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan	4	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (%)	100	100	100	100
4	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	5	Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	80	40	60	120
5	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	6	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93	40	40	100
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	7	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80	80	91,08	113,85
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80	80	92,39	115,49
		9	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	100	100
		10	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75	75	75	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	TARGET TW I	REALISASI	%
		11	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92	92	97,04	105,48

## 1. IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan; b. Cakupan wilayah pengawasan; c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Untuk mengukur Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

- Ikp = Indeks kinerja Kapal Pengawas
- Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi
- Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas
- Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

Variabel Pembentuk:

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal): Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) ]: Bobot 30%  
Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]
- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi: Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi kapal pengawas Triwulan I tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 5. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan I Tahun 2023

No	Stasiun	Kapal Pengawas	Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)			Pemeriksaan Kelautan (30%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intercept Indikasi Pelanggaran (80%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)	Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (30%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)			Dukungan Operasi Bersama (40%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Stasiun
			TWI			TWI			TWI			TWI			TWI			TWI	TWI			TWI			TWI								
			Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai				
1	Stasiun PSDKP Pontianak	KP_HIU MACAN 01	40	63	70	0	0	30	40	0.18	0.18	40	0	0	0	60	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	100.00	99.53	
		KP_HIU 11	30	29	67.7	0	0	30	39.07	0.18	0.18	40	0	0	0	60.00	0	0	40	15	0	0	30	0	0	30	0	0	40	5	99.07		

Capaian pada IKU indek kinerja operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 99,53 atau dengan capaian sebesar 113,62%. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,6. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dimana IKU pada tahun 2021 merupakan Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena pada tahun 2022 pengukuran pada triwulan II dan IV. Tercapainya IKU ini dikarenakan realisasi hari operasi yang mencapai dari target hari operasi dan jumlah kapal yang diperiksa dan unsur lain yang menjadi komponen perhitungan indeks operasi kapal pengawas. Untuk mendukung IKU ini telah telah dialokasikan dana sebesar Rp. 18.872.510.000 dengan realisasi sampai bulan Maret sebesar Rp. 3.504.714.883 atau dengan persentase sebesar 18,57%. Keberhasilan capaian IKU ini dikarenakan kondisi kapal pengawas (Hiu Macan 01 dan Hiu 11) pada Triwulan I tahun 2023 dengan kondisi yang siap untuk beroperasi sedangkan faktor cuaca buruk hanya terjadi pada awal tahun yaitu bulan Januari sehingga bulan Februari dan Maret dapat dimaksimalkan gelar operasi. Hal ini sejalan dengan kegiatan perawatan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Pontianak. Jumlah dan kondisi kesiapan AKP (awak kapal pengawas) juga menjadi penentu keberhasilan capaian IKU ini, AKP yang ditempatkan sudah memiliki kecakapan pengawakapan kapal yang cukup mumpuni. Pada tahun 2022 lalu AKP Stasiun PSDKP Pontianak Juga melakukan *Medical Check-Up* untuk pemantapan kondisi kesehatan AKP selama bertugas.

Tabel 6. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Operasi Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	87,6	99,53	87,6	99,53
% Capaian	-		-		-		114		114	

## 2. IKU Indeks kinerja Speed Boat Pengawas

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yakni; 1). Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan; 2). Cakupan wilayah pengawasan; 3). Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; 4). Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi. Formula perhitungan:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

$i_{sp}$  = Indeks kinerja Speedboat Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas

Target = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas:

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:

- Pemeriksaan Kapal (unit kapal): Bobot 50%

- Pemeriksaan Kelautan (kali): Bobot 50%
  - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari.
2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015)
  - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
- Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan: Bobot 60%
  - Dukungan kegiatan SAR: Bobot 40%
  - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
- Penyitaan Alat Tangkap Terlarang Bobot: Bobot 40%
  - Pemutusan Rumpon Illegal: 40%
  - Dukungan Operasi Bersama: Bobot 20%
  - Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Hasil pengukuran indeks kinerja operasi Speedboat pengawas Triwulan I tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 7. Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Periode Triwulan I Tahun 2023

Lokasi UPT	Nama Speedboat	Pemeriksaan Kapal Perikanan (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (40%)			Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (40%)			Intersept Indikasi Pelanggaran (60%)			Dukungan Kegiatan SAR (40%)			Tindak Lanjut Target Operasi (15%)			Penyitaan Alat Tangkap Terlarang (40%)			Pemutusan Rumpon Ilegal (40%)			Dukungan Operasi Bersama (20%)			Dukungan Operasi Lainnya (5%)			Total Nilai Indeks	Nilai per Satker
		TWI			TWI			TWI			TWI			TWI			TWI			TWI			TWI			TWI										
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai					
Stasiun PSDKP Pontianak	Napoleon 03	5	10	50	0	0	50	40,00	0,0011	0,004148	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5,00	100							
	Napoleon 37	8	12	50	0	0	50	40,00	0,0011	0,00663	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5,00	100							
	Napoleon 38	10	10	50	0	0	50	40,00	0,0011	0,00829	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5,00	100							
	RB/Sea Rider 05	0	0	50	0	0	50	40,00	0	0	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5,00	100							
	Speed Boat TB.01	8	10	50	0	0	50	40,00	0,0011	0,006637	40	0	0	60	0	0	40	15	0	0	40	0	0	40	0	0	20	5,00	100							

Capaian pada IKU indek kinerja operasi Speedboat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dengan capaian pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 100 atau dengan capaian 114,15 dengan rincian pada tabel diatas. Capaian IKU ini telah melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,6. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 5 tahun terakhir karena merupakan IKU baru pada tahun 2022 perhitungan triwulan II. Tercapainya IKU ini dikarenakan realisasi hari operasi yang telah mencapai dari target hari operasi. Keberhasilan dikarenakan kegiatan gelar operasi dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dengan pemilihan rute operasi yang tepat. Selain itu juga kapal yang diperiksa dapat mencapai target karena kapal yang diperiksa masih dapat dijangkau oleh armada Speedboat pengawas. Kondisi Speedboat juga siap untuk melakukan gelar operasi dengan kondisi yang baik. Kegiatan perawatan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 sehingga menjamin kesiapan dalam kesiapan operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada awal tahun 2023. Penyebaran operator Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang merata di tiap Satwas/Wilker menjadikan kegiatan gelar operasi menjadi lebih siap dan menggunakan tenaga operator Speed Boat yang berkompeten dibidangnya. Untuk mendukung IKU ini telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.030.775.000 dengan realisasi sampai bulan Maret sebesar Rp. 138.000.400 atau dengan persentase sebesar 16,61%.

Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian Indek operasi Speed Boat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks kinerja Speed Boat Pengawas	-	-	-	-	-	-	87,6	100	87,6	100
% Capaian	-		-		104		114		114	

### 3. IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan” diidentifikasi kedalam IKU yaitu: “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak” dan Ukuran keberhasilan indikator kinerja tersebut diperoleh dari agregasi 4 (empat) Sub IKU Pengawasan SDK yaitu: (1) Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPRL); (2) Jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (3) Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak; (4) Pelaku Usaha Yang Diawasi Dari Kegiatan Destructive Fishing Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pada Tahun 2023 ditargetkan presentase sebesar 100% dan untuk Triwulan I ditargetkan sebesar 100%. Untuk capaian pada Triwulan I sebesar 100% dengan persentase sebesar 100%. Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian tahun lalu mengalami nilai yang sama dimana pada periode Triwulan I Tahun 2022 capaian sebesar 100% dan lebih tinggi dari Triwulan I tahun 2021 sebesar 75%. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang sama dengan tahun 2021 dan tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020 atau 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 target capaian dalam bentuk jumlah pelaku usaha sedangkan tahun 2021 dan 2022 target capaian dalam bentuk persentase.

Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan diperoleh dari perhitungan 4 komponen pembentuk sebagai berikut:

$$xk = (xpkkprl + xjikan + xcemar + xdf) / n$$

$xk$  : Persentase pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

$xpkkprl$  : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut;

$xjikan$  : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi

$xcemar$  : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

$xdf$  : Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing

$n$  : Jumlah komponen kepatuhan di UPT

Sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Xk = (100+100+100+100) / 4$$

$$Xk = 100\%$$

Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Triwulan I tahun 2023 adalah 100% yang terbentuk dari:

**a. Pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi**

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari pemanfaatan jenis ikan dilindungi pada Triwulan I tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9. Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi

No	Pelaksana	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pelaku Usaha	Alamat	Detail kegiatan Usaha	Dokumen Perizinan	Hasil Pengawasan	Ket
1	Wilker Ketapang	31 Januari 2023	Robi Septiadi	Komplek. Pondok Indah Lestari, Blok D1, No.17 RT 004/ RW 011, Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	Hiu dan Pari Look a like species	1270000101308	Telah melakukan pengiriman / distribusi produk olahan berupa kulit hiu dan pari look a like tanpa disertai surat rekomendasi dari BPSPL Pontianak dan kepadanya telah diberikan surat teguran tertulis.	Tidak Patuh
2	Stasiun PSDKP Pontianak	15 Februari 2023	Rudi Hartono / PT. Global Asia redwana	Jl. Dr Wahidin Komp. Sepakat Asri No. C6, Kota Pontianak	Penangkaran ikan arwana	2012210034087	Tidak dapat melakukan usahanya dari PT. Global Asia Redwana / NIB. 2012210034087 karena mengalami kendala	Patuh

							pengurusan dokumen perizinan di pemerintah pusat dan aliran dana asing pun telah dihentikan, sehingga kegiatan usaha dilakukan menggunakan PT. Global Alam Redwana yang berstatus PMDN dengan NIB. 0220104140775	
3	Satwas PSDKP Kota Waringin Bara	10-12 Maret 2023	Albert Argiatio Efendiy	Jl. Samudin Kel. Kuala Pembuang Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan	Hiu /Pari		Pelaku dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi tidak dilengkapi dengan dokumen SIPJI	Tidak Patuh

Pada Triwulan I tahun 2023 pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan dilindungi berjumlah sebanyak 3 pelaku usaha. Pelaku usaha melaksanakan usaha dibidang pengimana jenis ikan dilindungi di Wilker PSDKP Ketapang kemudian dari hasil pemeriksaan tidak dilengkapi dengan dokumen resmi kemidian pelaku diberi teguran tertulis. Pelaku usaha Penangkaran jenis ikan dilindungi berupa ikan arwana di jalan DR. Wahidin Kota Pontianak dimana proses pemanfatan telah taat kemudian pelaku usaha di Kecamatan Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan kegiatan usaha berupa pemanfatan penangkapan jenis ikan dilindungi berupa Hiu dan Pari dimana tidak dilengkapi dengan dokumen SIPJI sehingga diberikan sanksi berupa surat teguran tertulis.

#### **b. Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing**

Rekapitulasi pelaku usaha yang diawasi dari kegiatan destructive fishing pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Pelaku usaha yang diawasi kegiatan destructive fishing

NO	PELAKU USAHA	JENIS KEGIATAN	LOKASI	HASIL PENGAWASAN
1	Muslimin	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
2	Hendra	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
3	Saharudin	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
4	Sukardi	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran

NO	PELAKU USAHA	JENIS KEGIATAN	LOKASI	HASIL PENGAWASAN
5	Yunus	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
6	Rahmanto	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
7	Suparto	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran
8	Pendi	Nelayan Kapal < 10 GT	PPP Teluk Batang	Tidak ada dugaan pelanggaran

Pada triwulan I pengawasan destructive fishing telah dilakukan sebanyak 8 pelaku usaha terhadap nelayan dengan kapal <10 GT. Dari 8 kapal tersebut semua kapal dilakukan di PPP Teluk Batang oleh Satwas Kayong Utara. Dari hasil pemeriksaan 8 kapal yang diperiksa tidak ditemukan indikasi melakukan kegiatan destructive fishing dan tidak adanya dugaan pelanggaran.

**c. Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya**

Perairan darat dan laut adalah ekosistem akuatik yang memiliki peran penting dalam siklus hidrologi. Selain dipengaruhi oleh aktivitas organisme atau lingkungan, kualitas suatu perairan juga ditentukan oleh aktivitas manusia. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi area pemukiman, pertanian, serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kualitas perairan. Perairan menjadi ekosistem yang rentan tercemar akibat limbah yang dihasilkan dari beragam pola pemanfaatan lahan dan aktivitas industri. Mengingat peran penting perairan bagi keberlangsungan hidup organisme, termasuk berbagai jenis ikan, maka pemantauan perairan yang terindikasi tercemar sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan, komprehensif, dan menggunakan metode yang tepat agar dapat segera ditangani.

Pada Triwulan I Pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya sebanyak 1 pelaku usaha yang telah dilakukan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sebagaimana rincian berikut; 1). Pada tanggal 13 Januari 2023 telah dilakukan pengawasan terhadap PT. Energi Unggul Persada yang beralamat di Jalan Raya Sungai Limau, Ds. Sungai Limau, Kec. Sungai Kuyit, Kab. Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pelaku usaha sudah

memiliki izin usaha berupa SIUP No. 447/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2017, Tanda Daftar Perusahaan No. 803/24.3PT/31.74/-1.824.27/e/2017 dan dokumen lainnya PERTEK Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang Ke Laut No. S.103/PPKL/PPKPL/PKL.1/3/2021, AMDAL No. 503/01/SKKL/DPMPTSP-C.I/2022 . unit usaha juga dilengkapi IPAL yang terdiri: Oil Trap, Accident Tank, Equalization Tank, Tube Settler Clarifier, Feed Tank, Conditioning Tank, Aerasi Pond, Final Pond, Belt Press. Dari hasil pengamatan tidak ditemukan biota/ikan yang terdampak / tidak ada indikasi terjadinya pencemaran dari kegiatan Industri Pengolahan Kelapa Sawit

**d. Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut**

Pada Triwulan I tahun 2023 Pemeriksaan kepatuhan usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut sebanyak 5 pelaku usaha. Dimana pelaku usaha tersebut dapat dijelaskan pada tabel;

Tabel 11. Pengawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut

No	Unit usaha	Lokasi	Jenis Kegiatan	Hasil pengawasan
1	PT. Energi Unggul Persada	Jalan Raya Sungai Limau, Ds. Sungai Limau, Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah, KALBAR	Pemanfaatan ruang laut untuk pendirian bangunan Pipa Penyalur Minyak Sawit Mentah (CPO) dan Produk Olahannya	Berdasarkan hasil pengambilan foto udara dan analisis tumpang susun dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat kawasan pipa penyalur minyak sawit pada PT. EUP tidak masuk kedalam zona konservasi Pulau Temaju dan akan diurus PKKPRL nya di BPSPL Pontianak
2	PT. Randayan Hartadika Abadi	Pulau Randayan, Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 42' 50" N; 108° 43' 44" E	Kegiatan Pariwisata Laut / Resort	"Randayan Hartadika Abadi memiliki indikasi kepatuhan dengan langkah yang sesuai dengan sosialisasi yang telah diterimanya dari BPSPL Pontianak yaitu segera mengajukan permohonan izin PKKPRL dan POLSUS PWP3K Bersama BPSPL telah melakukan pengukuran luasan serta letak koordinat yang dimanfaatkan untuk diajukan di dalam permohonan dengan menggunakan drone sesuai kondisi di lapangan• Berdasarkan hasil foto udara didapatkan bahwa Randayan island resort memiliki bangunan yang memanfaatkan ruang laut berupa 2 buah dermaga yang difungsikan

				<p>sebagai tempat sandar kapal yang digunakan untuk mengantarkan tamu/wisatawan, selain itu juga terdapat breakwater yang masuk kedalam lokasi pemanfaatan ruang laut. • Potensi pemanfaatan ruang laut yang digunakan oleh Randayan Island Resort tersebut sebesar 0.92 Ha yang memuat bangunan laut berupa 2 buah dermaga dan breakwater. Luasan tersebut terbentuk dari titik-titik yang saling menghubungkan sebagai berikut:</p> <p>1. Dermaga 1. 0,12 Ha Dermaga 2 .0,54 Ha 2. Breakwater 0,26 Ha Jumlah 0.92 Ha"</p>
3	PT. Sinar Sakti Sahabat Sejati Jaya	Kegiatan Budidaya Tiram Mutiara	<p>Pulau Penata besar, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 45' 29" N; 108° 46' 16" E</p>	<p>PT. SINAR SAKTI SAHABAT SEJATI JAYA memiliki indikasi kepatuhan dengan langkah yang sesuai dengan sosialisasi yang telah diterimanya dari BPSPL Pontianak yaitu segera mengajukan permohonan izin PKKPR dan POLSUS PWP3K Bersama BPSPL telah melakukan pengukuran luasan serta letak koordinat yang dimanfaatkan untuk diajukan di dalam permohonan dengan menggunakan drowm sesuai kondisi di lapangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan yang dilakukan oleh PT. Sinar Sakti Sahabat Sejati Jaya di Pulau Penata Besar meliputi bangunan laut berupa Rumah Jaga yang difungsikan sebagai sarana tambat labuh kapal untuk operasional kegiatan budidaya, serta long line sebagai media budidaya Kerang Mutiara dan rakit apung sebagai sarana penunjang. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi menggunakan pengambilan foto udara dan tagging lokasi pemanfaatan melalui tracking longline dengan nilai buffer antara titik terluar longline sebesar 10 Meter.</li> <li>• Luasan Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan hasil identifikasi adalah sebagai berikut: 1 Rumah Jaga 0,01 Ha 2 Longline 22,89 Ha Jumlah 22,90 Ha</li> </ul>
4	CV. Borneo Mutiara	Kegiatan Budidaya Tiram Mutiara	<p>Perairan Laut Natuna, Pulau Lemukutan, Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 46' 21" N; 108° 42' 50" E</p>	<p>CV. Borneo Mutiara memiliki indikasi kepatuhan dengan langkah yang sesuai dengan sosialisasi yang telah diterimanya dari BPSPL Pontianak yaitu segera mengajukan permohonan izin PKKPR pada tanggal 6 Maret</p>

				<p>2023 dan POLSUS PWP3K telah mengecek kesesuaian luasan serta letak koordinat yang diajukan di dalam permohonan dengan kondisi di lapangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CV. Borneo Mutiara beralamat kantor di Sukomanunggal Indah 2-A, Kel.Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang dipimpin oleh Wanto Sukendy. CV. Borneo Mutiara melakukan kegiatan budidaya Kerang Mutiara menggunakan metode longline sebanyak 22 unit dengan fasilitas penunjang berupa Dermaga dengan ukuran 25 x 1,2 m sebanyak 1 buah, Rakit Kerja sebanyak 2 unit dengan ukuran 4m x 8m, keramba jaring apung sebanyak 2 unit, serta bangunan kerja sebanyak 1 unit.</li> <li>• Luasan Pemanfaatan Ruang Laut berdasarkan hasil identifikasi adalah sebagai berikut: No Jenis Pemanfaatan Luasan (Ha) 1 Longline 23,10 2 Keramba Jaring Apung 0,04 3 Rumah Kerja 0,11 4 Jetty 0,001 Jumlah 23.25</li> </ul>
5	PT. Bima Budidaya Mutiara	Kegiatan Budidaya Tiram Mutiara	Perairan Laut Natuna, Pulau Lemukutan, Kalimantan Barat pada titik koordinat 0° 44' 1" N; 108° 43' 47.2" E;	<p>PT. Bima Budidaya Mutiara di Lemukutan hingga saat ini hanya melakukan kegiatan usaha pembesaran tiram mutiara dengan penyuntikan nucleus sebagai bahan terbentuknya mutiara di dalam tubuh tiram dengan Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 10022310516100002 dan telah dilakukan pengecekan kesesuaian antara izin tertulis dan kondisi lapangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas = 5,31 Ha</li> <li>2. Koordinat pemanfaatan ruang Laut telah sesuai dengan yang tertuang di dalam peta PKKPRL;</li> </ol>

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 622.564.000 dan sampai dengan 31 Maret 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 20.810.000 atau sebesar 3,34%. Target yang telah tercapai dikarenakan pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan karena lokasi pengawasan yang berdekatan. Tercapainya target tidak terlepas

dari SDM pengawas perikanan dan Polsus PWP3K yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Keberhasilan pencapaian target yang baik dikarenakan pada awal tahun 2023 dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kemudian setelah 3 bulan yaitu akhir bulan Maret dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan lewat daring dan luring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh pelaksana koordinasi OPPP Stasiun PSDKP Pontianak. Jadi Sasaran Strategis dan Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 12. Perbandingan Target dan Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase/jumlah penyelesaian pemeriksaan Pelaku Usaha kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	50%	75%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
% Capaian	-		120		120		100		100	

#### 4. IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan” diidentifikasi kedalam indikator kinerja yaitu “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak” Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari persentase jumlah capaian pengawasan lainnya pelaku usaha bidang perikanan yang terdiri dari agresi 2 (dua) Sub IKU Pengawasan SDP yaitu: <sup>(1)</sup> Kepatuhan Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; <sup>(2)</sup> Kepatuhan Unit Usaha Budidaya Ikan terhadap Peraturan; dengan hasil capaian 100%.

Pada Triwulan I tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya, capaian pada Triwulan I ini tercapai sesuai dengan yang ditargetkan yaitu tercapai sebesar 100% unit pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya atau dengan persentase capaian 100%. Indikator tersebut apabila dibandingkan dengan periode tahun 2021 pada

periode triwulan I yaitu sama dengan capaian 100% dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 25%. Capai IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena IKU ini dimulai pada tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Capaian indikator kinerja “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak”, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 2 (dua) Sub-IKU, sebagaimana dijelaskan diatas. Untuk Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, sebagai berikut:

**a) Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pembudidayaan Ikan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak**

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengawasan terhadap usaha budidaya ikan meliputi dokumen perizinan, obat dan pakan ikan yang digunakan dengan pedoman pemeriksaan yaitu Perdirjen 06 Tahun 2021. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pembudidayaan ikan Stasiun PSDKP Pontianak, maka harus memenuhi persyaratan seperti tabel berikut:

Tabel 13. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat

NO	TAHAPAN PEMERIKSAAN	NILAI	OUTPUT
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Rincian pemeriksaan kepatuhan unit unit usaha pembudidayaan ikan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rekapitulasi Pelaku usaha unit usaha pembudidayaan ikan

NO	UPT/SATWAS	NAMA UBI/PEMILIK	SKALA	KOMODITAS	KETAATAN
1	Stasiun PSDKP Pontianak/Mempawah	PT. Enviro Aquafarm Sukses	Kecil	Udang Vanamei	Pembinaan
2	Stasiun PSDKP Pontianak	PT. Global Asia Redwana	Menengah	Ikan arwana	Pembinaan
3	Stasiun PSDKP Pontianak	CV. Irza Li Fardha	Mikro	Ikan air tawar	Pembinaan
4	Stasiun PSDKP Pontianak	PT. Bima Budidaya Mutiara	Besar	Kerang Mutiara	Pembinaan
5	Stasiun PSDKP Pontianak	CV. Borneo Mutiara	Mikro	Kerang Mutiara	Pembinaan

**b) Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.**

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik didalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB). Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak, maka harus memenuhi persyaratan seperti tabel Berikut:

Tabel 15. Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap pemeriksaan 1 (satu) KBLI subsektor pengolahan dan pemasaran ikan, sebagaimana tabel di bawah:

NO	TAHAPAN PEMERIKSAAN	NILAI	OUTPUT
1	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ke Pelaku Usaha	0,15	- Surat Pemberitahuan - SPT - Daftar Pertanyaan Dokumen
2	Pemeriksaan Teknis	0,70	- Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran 1) - Formulir Pemeriksaan
3	Pelaporan	0,15	Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan (data yang telah terinput dalam sistem pelaporan Dit. PPSDP)
Jumlah Nilai		1	

Rincian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rekapitulasi Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

NO	NAMA UPI	ALAMAT	NIB/KODE PROYEK	SKALA	KETAATAN
1	PD. Maju Jaya	Jl. Adi Adi Sucipto KM 5.8 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya	9120202172782	Kecil	Tertib Administrasi
2	PT. Global Asia Redwana	Jl. Pondok Indah Lestari Komp. Permata No.02	2012210034087/202208-3013-2510-2631-410	Besar	Pembinaan
3	PT. Global Asia Redwana	Jl. Pondok Indah Lestari Komp. Permata No.02	202207-2521-2421-1879-348	Besar	Pembinaan
4	PT. Global Asia Redwana	Jl. Pondok Indah Lestari Komp. Permata No.02	2012210034087	Besar	Pembinaan
5	PT. Global Asia Redwana	Jalan Dr. Wahidin Komplek Sepakat Asri Nomor C6	202201-2020-2200-4834-178	Besar	Pembinaan
6	Albert Argianto Effendy	Jl. Samudin RT 002 RW 001 Kelurahan Kuala Pembuang Kec. Seruyan Hilir	-	Mikro	Penerapan Sanksi
7	CV. Irza Li Fardha	Jalan Tebu Gg. Teguh Karya No.16 Kelurahan Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat	9120301451317/76.653.304.6-704.001	Mikro	Pembinaan

Pada Triwulan I tahun 2023 jumlah pengawasan lainnya terhadap unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebanyak 7 kode proyek dimana pengawasan yang dilakukan merupakan pengawasan lainnya. Pengawasan yang telah dilakukan disekitar wilayah Pontianak dan kubu raya sedangkan 1 pelaku usaha dilakukan di seruyan, Kalimantan tengah. Dari 7 kegiatan terdapat 6 yang diberikan Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi

penyelesaian permasalahan perusahaan dan 1 diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis tahap I.

Untuk mencapai sasaran kegiatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 657.000.000 dan sampai dengan 31 Maret 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 39.154.719 atau dengan realisasi 5,96%. Target yang tercapai dikarenakan pemeriksaan jumlah pelaku usaha dapat dilakukan karena lokasi pengawasan yang berdekatan seperti antara kota Pontianak dan Kubu Raya yang tidak terlalu jauh dari Stasiun PSDKP Pontianak seperti pengawasan usaha budidaya ikan dan unit pengolahan ikan. Tercapainya target tidak terlepas dari SDM pengawas perikanan yang berada di Stasiun PSDKP Pontianak dan tersebar di tiap Satwas/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Selain itu keberhasilan pencapaian target yang baik dikarenakan pada awal tahun 2023 tepatnya bulan Februari dilakukan pertemuan koordinasi Satwat/Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dalam percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan membahas perihal kegiatan teknis khususnya kegiatan pengawasaan sumberdaya perikanan. Kemudian setelah 3 bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan pengawasan lewat daring dan luring lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dikoordinir oleh pelaksana koordinasi OPKP Stasiun PSDKP Pontianak. Dengan ini dapat dikatakan indikator kinerja ini telah berhasil pada Tahun 2023 dikarenakan telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 17. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase/jumlah penyelesaian pemeriksaan Pelaku Usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	100	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% Capaian	25		100		100		100		100	

## 5. Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Persentase Penyelesaian sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu sanksi administratif yang diputuskan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan: a. UPT PSDKP untuk penerapan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1

(SP1)/Paksaan Pemerintah; b. Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin; c. UPT PSDKP/Dit.PP untuk pengenaan sanksi administratif Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perizinan Berusaha di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pemanfaatan Ruang Laut Importasi Komoditas Perikanan dan Pergaraman, Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Teguran/Paksaan); d. Dit.PP (Pusat) untuk Penetapan denda administratif, atau rekomendasi Pembekuan/pencabutan izin / pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP

Hasil Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dihitung berdasarkan rumus:

Hasil Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut :

Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

$$(xc) = \left( \frac{a}{\sum b} \right) \times 100\%$$

Xc = Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

a = Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berdasarkan penetapan sanksi administratif

$\sum b$  = Total kasus pelanggaran sanksi administratif yang direkomendasikan dikenakan sanksi administratif

Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dan tidak ada kasus terkait sanksi administratif di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.

Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan I tahun 2023 telah menangani 5 kasus pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan. Dari 5 perkara tersebut yang telah dikenakan sanksi, baru 3 perkara yang sudah selesai proses penetapan dengan dikeluarkan susarat sansi berupa teguran atau paksaan pemerintah tahap I. sehingga capaian triwulann I ini sebesar 60% atau dengan persentase 120%. Capaian ini melebihi dari target yang telah di

tentukan sebesar 40%. %. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 periode yang samau karena IKU ini ditargetkan pada akhir tahun atau triwulan IV. IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan 5 Tahun terakhir karena merupakan IKU yang dimulai pada tahun 2021.

TPKP yang merupakan kasus kapal berbendera Indonesia. Dari 1 kasus TPKP yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Pontianak, 1 kasus perkara tersebut sudah tahap II, sehingga didapat nilai realisasi sebesar 100%.

Tabel 18. Rekapitulasi Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

NO	Nama Unit Usaha	Lokasi Kejadian	Jenis Pelanggaran	Keterangan
1	Robi Septia	Ketapang	Melakukan Pengiriman produk perikanan berupa kulit Hiu dan Pari tanpa dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dan dukungan Health Certificate (HC)	Peringatan / Teguaran tertulis
2	Albert Argianto Effendy	Seruyan Kal-Teng	pelanggaran pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi atau masuk Appendiks CITES tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha (NIB dan SIPJI),	Teguran Tertuli
3	PT. Welindo Erabadi Lojaya	Pontianak	Kegiatan pengolahan ikan yang belum memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil berupa tidak memiliki dokumen SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)	Peringatan ke II

Keberhasilan IKU ini dikarenakan tidak terlepas dari kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala atau terjadwal seperti pengawasan menggunakan kapal Pengawas dan sarana speed boat pengawasan dan pengawasan rutin kepada pelaku usaha seperti unit pengolahan ikan dan pembudidayaan ikan. Selain itu penyelesai kasus terkait pengenaan sanksi administratif oleh pengawas perikanan dan PPNS sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan waktu yang diinginkan. Dalam mendukung pencapaian IKU ini telah dianggarkan sebesar Rp. 100.000 sampai dengan 31 Maret 2023 telah realisasi sebesar Rp. 18.860.300 atau sebesar 18,86%. Indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil karena sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Penanganan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Penyelesaian Pengenaan sanksi administratif	-	-	-	-	-	-	40	60	40	60
<b>% Capaian</b>	-		-		-		120		120	

## 6. Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Persentase Penyelesaian sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).

Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut:

Persentase Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

$$(xa) = \left( \frac{a}{\sum b} \right) \times 100\%$$

$xa$  = Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

$a$  = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$  = Total kasus Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai denganselesai (P-21 dan/atau

penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan/atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3).

Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit Satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di *claim* sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di Stasiun PSDKP Pontianak dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan. Pada triwulan I tahun 2023 belum menangani kasus TPKP sehingga didapat nilai realisasi sebesar 40% dimana sama dengan nilai target pada triwulan I atau capaian sebesar 100%.

Capaian pada IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2022 dengan capaian pada periode yang sama sebesar 100% sedangkan pada periode Triwulan I tahun 2021 sebesar 80%. Artinya capaian triwulan I tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022 pada periode yang sama. IKU ini merupakan IKU yang ada di 2020, 2021 dan 2023 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian IKU 5 tahun terakhir.

Capaian yang telah dicapai melebihi dari target yaitu Stasiun PSDKP Pontianak dikarenakan tidak lain merupakan bentuk dari hubungan yang baik antara Stasiun PSDKP Pontianak dengan penegakan hukum terkait seperti Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Pontianak dan *stakeholder* lainnya seperti Saksi Ahli, Juru Bahasa dan lainnya sehingga proses dari penyidikan tersebut selesai dengan waktu yang ditentukan. Adapun Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023 mendapat pagu sebesar Rp. 256.200.000 untuk penyidikan TPKP sampai dengan 31 Maret 2023 belum ada realisasi anggaran atau sebesar 0% dikarenakan belum ada perkara yang ditangani. Pada triwulan I tahun 2023, walau belum ada kasus yang ditangani tapi target telah tercapai dari yang sudah ditentukan sebesar 40%.

Tabel 20. Perbandingan Target dan Capaian Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	100	100	0	80	35	100	40	40	100	100
<b>% Capaian</b>	<b>100</b>		<b>120</b>		<b>120</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

## 7. IKU (Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)

Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada Triwulan I Tahun 2023 terealisasi sebesar 91,08 dari target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase 113,85%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dimana capaian pada triwulan I Tahun 2021 yaitu sebesar 88,75 dan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 yaitu sebesar 93,15. IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2020 karena pada periode tersebut belum terdapat capaian karena capaian pada triwulan IV. IKU ini juga tidak dapat Apabila dibandingkan dengan 5 tahun terakhir karena ini merupakan IKU baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu SLO (Surat Laik Operasi). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada Triwulan I ini atau setahun sebanyak 4 kali dalam setahun.

Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah ada baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing masing kantor

layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: [lapor.go.id](http://lapor.go.id) dan [kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak](http://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak). Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan. Pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan. Hal juga ini disebabkan oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman, Transparant, Adil, Profesional) pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan. Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO dapat dilayani langsung oleh petugas yang ada di setiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak) dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan SLO adalah 90 menit. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih. Stasiun PSDKP Pontianak akan tetap terus meningkatkan sarana dan prasarana di seluruh wilayah Satwas dan Wilker lingkup Stasiun PSDKP Pontianak.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TRIWULAN I TAHUN 2023			
NILAI IKM	NAMA LAYANAN:	PENERBITAN SLO	
<b>91.08</b>	RINCIAN		
	JUMLAH RESPONDEN	226	Orang
	JENIS KELAMIN	L	226
		P	0
	PENDIDIKAN	SD	124
		SMP	73
SMA		29	
S1		0	
S2		0	
PERIODE SURVEY :	10 Januari - 10 Maret 2023		
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT			

Gambar 5. Perhitungan SKM SLO (Surat Laik Operasi)

Tabel 21. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	80	88,75	80	93,15	80	91,08	80	91,08
<b>% Capaian</b>			<b>111</b>		<b>116</b>		<b>114</b>		<b>114</b>	

#### 8. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (indeks)

Pemenuhan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan I Tahun 2023 terealisasi sebesar 92,39 dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 115,49%. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dimana capaian pada tahun 2021 pada periode sama yaitu sebesar 87,46. Capaian ini juga lebih kecil apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 pada periode yang sama yaitu sebesar 94,15. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir karena merupakan indikator

kinerja baru yaitu indikator ini dimulai pada tahun 2021. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telat melebihi dari target yang sudah ditentukan. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yaitu LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap triwulan I ini atau selama tahun 2023 sebanyak 4 kali dengan ini indikator kinerja dapat dikatakan berhasil dikarenakan telah melampaui target.

Keberhasilan indikator kinerja ini dikarenakan langkah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan telah memanfaatkan kanal-kanal yang telah ada baik melalui kotak pengaduan yang telah ada di masing masing kantor layanan di setiap Satwas dan Wilker PSDKP, mensosialisasikan nomor kontak pengaduan yang bisa dihubungi baik via telepon, sms maupun WhatsApp, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan dalam menyampaikan aduan, saran, dan masukan melalui website: [lapor.go.id](http://lapor.go.id) dan [kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak](http://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak). Respon dalam penanganan aduan, saran, dan masukan juga dipercepat dengan telah membentuk tim khusus dalam penanganan aduan, saran, dan masukan. Pemberian pelatihan/bimbingan teknis kepada petugas pelayanan telah berpengaruh baik dan dirasakan oleh pengguna layanan, hal ini juga disebabkan oleh petugas pelayanan telah menerapkan Budaya Pelayanan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Syukur) dan menerapkan Motto Pelayanan MANTAP (Mudah, Akuntabel, Nyaman, Transparan, Adil, Profesional) pada saat melakukan pelayanan kepada pengguna layanan. Pelayanan di lingkup Stasiun PSDKP Pontianak. Pelayanan Selama ini yang telah berjalan adalah 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan atau nonstop setiap hari sehingga sewaktu-waktu nelayan atau pengusaha membutuhkan SLO dapat dilayani langsung oleh petugas yang ada di setiap kantor layanan. Hal tersebut termasuk pengejawantahan standar pelayanan yang telah disepakati oleh penyedia layanan (Stasiun PSDKP Pontianak) dengan pemanfaat layanan (Pelaku Usaha) bahwa Standar Pelayanan LVHPI adalah 75 menit, Mekanisme, dan Prosedur sudah ditetapkan oleh Stasiun PSDKP Pontianak dalam bentuk SOP yang telah disosialisasikan dan ditempel di setiap kantor layanan di setiap Satwas dan

Wilker PSDKP. Pengguna layanan akan terus diberikan pemahaman bahwa petugas pelayanan publik selama ini dalam menjalankan tugasnya telah menerapkan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang sudah ditetapkan di setiap kantor pelayanan telah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung sebagai standar minimal kantor layanan seperti kursi, meja, perangkat komputer dan alat tulis kantor penunjang, alat peraga dan papan informasi, ruangan yang nyaman dan toilet yang bersih.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)			
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK			
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
TRIWULAN I TAHUN 2023			
NILAI IKM	NAMA LAYANAN:	PENERBITAN LVHPI	
<b>92.39</b>	RINCIAN		
	JUMLAH RESPONDEN :	112	Orang
	JENIS KELAMIN	L	112
		P	0
	PENDIDIKAN	SD	76
		SMP	22
	SMA	14	
	S1	0	
	S2	0	
	PERIODE SURVEY :	10 Februari - 21 Februari 2023	
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT			

Gambar 6. Perhitungan SKM LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan)

Tabel 22. Perbandingan Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	80	87,46	80	94,15	80	92,39	80	92,39
<b>% Capaian</b>	-		109		118		115		115	

## 9. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

- X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
- a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
- b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

Perhitungan capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak sampai dengan 31 Maret tahun 2023 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 sebesar 100% mencapai dari target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan Capaian pada tahun 2022 pada periode yang sama karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang dimulai pada tahun 2023, indikator kinerja ini juga tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. Tercapainya indikator kinerja ini dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak telah Menyusun Laporan SPIP tahun 2022 dan telah dilaporkan secara berjenjang dan tepat waktu. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko di tiap bidang juga telah dilakukan antara lain Manajemen Risiko bagian Tata Usaha, Manajemen risiko bagian sarana dan Prasarana dan manajemen risiko tata usaha. Selain itu pegawai di tiap-tiap bidang telah mengikuti workshop dalam penyusunan dokumen manajemen risiko. Dengan demikian indikator kinerja ini telah tercapai yang mana telah mencapai dari target yang telah ditentukan pada triwulan I. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 23. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

No	Satuan Kerja	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Stasiun PSDKP Pontianak	19	19	100

Perbandingan Pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 24. Perbandingan Target dan Capaian pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100
<b>% Capaian</b>	-		-		-		100		100	

### 10. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

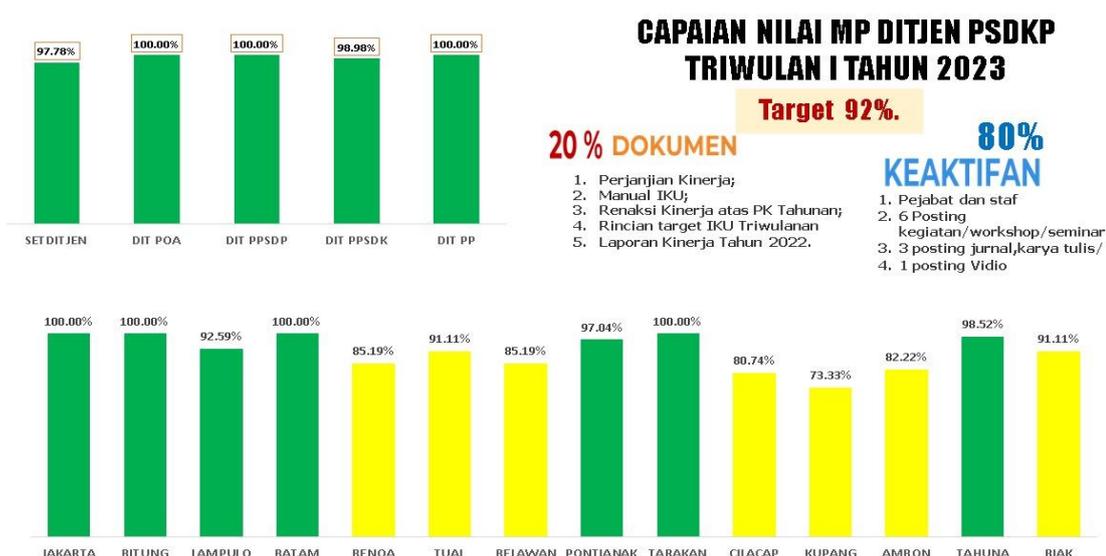
Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu: Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja, Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV, Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Untuk mengukur indikator kinerja ini yaitu komponen pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, berupa: a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2); b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix); c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);

Cara Mengukur :a) Menggunakan Aplikasi Bitrix; b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan; c) Pengukuran dokumen: Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun, Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan, Renaksi Kinerja, Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan, Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi. Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan. Target pertahun sebesar 92%. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sampai dengan 31 Maret tahun 2023 mengadopsi

dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 sebesar 97,04% melebihi dari target yang ditetapkan pada triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 92%. Apabila dibandingkan dengan Capaian pada tahun 2020, indikator kinerja ini mengalami peningkatan karena Capaian pada triwulan I tahun 2020 tercapai sebesar 55,56% sementara pada tahun 2021 pada periode sama mengalami penurunan dimana capaian sebesar 97,78%. Capaian ini juga lebih besar dari tahun 2022 pada periode sama dimana capaian sebesar 86,11%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditentukan. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian 5 tahun terakhir.

Target indikator kinerja ini dapat dicapai dan melampaui target yang ditentukan dikarenakan adanya pemenuhan dokumen Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja tahun 2023, Manual IKU, Rencana Aksi Kinerja atas PK Tahunan. Selain itu keikutsertaan dan keaktifan pejabat dan staf Stasiun PSDKP Pontianak dalam aplikasi bitrix24.com ternilai maksimal karena secara reguler dilakukan evaluasi terhadap postingan bulanan Stasiun PSDKP Pontianak pada aplikasi bitriks24.com sebagai rincian capaian indikator kinerja ini. Capaian indikator kinerja unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Capaian IK unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Nilai Manajemen pengetahuan yang terstandar pada triwulan I tahun 2023 Stasiun Pontianak mendapatkan hasil yang cukup baik karena melebihi target selain itu juga ada beberapa UPT PSDKP yang belum mendapatkan nilai maksimal atau dibawah dari target sebesar 92%.

Tabel 25. Perbandingan Target dan Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

INDIKATOR KINERJA	TW I 2020		TW I 2021		TW I 2022		TW I 2023		TW I 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak	65	55,56	84	97,78	86	86,11	92	97,04	92	97,04
<b>% Capaian</b>	85		116		100		105		105	

#### 11. IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Indikator kinerja ini merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2020 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2021 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Target Indikator Kinerja ini lingkup Stasiun PSDKP Pontianak tahun 2023 sebesar 75%. Sampai 31 Maret tahun 2023 data hasil sebesar 75% dikarenakan Stasiun PSDKP Pontianak pada perhitungan triwulan I tidak adanya temuan sehingga capaian 75% sama dengan target Triwulan I yaitu sebesar 75% dengan persentase capaian 100%. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini berhasil dikarenakan realisasi telah melebihi dari target yang sudah ditentukan. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2022 sama dengan persentase 100%. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan 5 tahun terakhir karena merupakan indikator kinerja baru yang dimulai tahun 2022. Tercapainya indikator ini dikarenakan tidak terlepas dari Stasiun PSDKP Pontianak yang secara responsif menindak lanjuti rekomendasi yang diberikan dalam perbaikan kinerja organisasi

dimulai dari pimpinan sampai diturunkan pada pegawai dibawahnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik. Capaian hasil persentase Jumlah rekomendasi Hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 26. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan

Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
Stasiun PSDKP Pontianak	0	0	-	0	-

Untuk mencapai Sasaran Strategis 8 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.693.554.000. dan sampai dengan 31 Maret 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 2.646.267.498 atau sebesar 15,85%. Tercapaiannya target indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2023 disebabkan oleh optimalnya realisasi anggaran dengan diimbangi pencapaian optimal terhadap target output yaitu pada kegiatan teknis dan dukungan manajemen perkantoran.

### 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Pontianak dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Pontianak pada triwulan I tahun 2023 telah membandingkan hasil capaian kinerja baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja manajerial dengan Satuan kerja UPT setara/ sejenis. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dibandingkan sebanyak 11 IKU. Adapun capaian Stasiun PSDKP Pontianak bila dibandingkan dengan hasil capaian kinerja triwulan I tahun 2023 dengan 7 (tujuh) UPT satker setara/ sejenis, sebagai berikut;

#### 1. IKU Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	87,6	100	114,15
2	Stasiun PSDKP Biak	87,6	100	114,15
3	Stasiun PSDKP Ambon	87,6	100	114,15
4	Stasiun PSDKP Tahuna	87,6	100	114,15
5	Stasiun PSDKP Pontianak	87,6	99,07	113,09

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
6	Stasiun PSDKP Belawan	87,6	100	114,15
7	Stasiun PSDKP Kupang	87,6	100	114,15
8	Stasiun PSDKP Tarakan	87,6	100	114,15

## 2. IKU Indeks Kinerja Operasional *Speedboat* Pengawas (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	87,6	100	114,15
2	Stasiun PSDKP Biak	87,6	100	114,15
3	Stasiun PSDKP Ambon	87,6	92,41	105,49
4	Stasiun PSDKP Tahuna	87,6	100	114,15
5	Stasiun PSDKP Pontianak	87,6	100	114,15
6	Stasiun PSDKP Belawan	87,6	100	114,15
7	Stasiun PSDKP Kupang	87,6	100	114,15
8	Stasiun PSDKP Tarakan	87,6	100	114,15

## 3. IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	90	90
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100

## 4. IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100

5. IKU Persentase efektivitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan Perikanan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	40	100	250	
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Tidak terdapat target
3	Stasiun PSDKP Ambon	40	40	100	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	40	100	250	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	40	40	100	
6	Stasiun PSDKP Belawan	40	100	250	
7	Stasiun PSDKP Kupang	40	40	100	
8	Stasiun PSDKP Tarakan	40	40	100	

6. IKU Persentase Efektifitas Pengenaan Sanksi Administratif Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	40	97,32	243	
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-	Tidak terdapat target
3	Stasiun PSDKP Ambon	40	40	40	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	40	40	40	
5	Stasiun PSDKP Pontianak	40	60	150	
6	Stasiun PSDKP Belawan	40	100	250	
7	Stasiun PSDKP Tarakan	40	100	250	
8	Stasiun PSDKP Kupang	40	40	100	

7. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Standar Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	92,60	115,75
2	Stasiun PSDKP Biak	80	93,97	117,46
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	90,94	113,67
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	89,79	112,23
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	91,06	113,82
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	89,48	111,85
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	95,35	119,18
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	90,69	112,50

8. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian	Keterangan
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	98,31	122,88	
2	Stasiun PSDKP Biak	80	-	-	Tidak terdapat target
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	90,88	113,60	
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	-	-	Tidak terdapat target
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	92,39	115,48	
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	90,10	90,10	
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	99	112,62	
8	Stasiun PSDKP Tarakan	80	90,48	113,10	

9. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100

10. IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	92	80,74	87,76
2	Stasiun PSDKP Biak	92	91,11	99,03
3	Stasiun PSDKP Ambon	92	82,22	89,37
4	Stasiun PSDKP Tahuna	92	98,52	107,09
5	Stasiun PSDKP Pontianak	92	97,04	105,48
6	Stasiun PSDKP Belawan	92	85,19	92,60
7	Stasiun PSDKP Tarakan	92	100	108,70
8	Stasiun PSDKP Kupang	92	73,33	79,71

11. IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	75	100
2	Stasiun PSDKP Biak	75	75	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	75	75	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	75	75	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	75	100
6	Stasiun PSDKP Belawan	75	75	100
7	Stasiun PSDKP Tarakan	75	75	100
8	Stasiun PSDKP Kupang	75	75	100

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak diperoleh dari agregasi 5 mata anggaran kegiatan Tahun 2023, yaitu: <sup>(1)</sup> Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; <sup>(2)</sup> Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; <sup>(3)</sup> Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; <sup>(4)</sup> Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan; <sup>(5)</sup> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP, dengan hasil pengukuran sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 27. Rincian Realisasi Anggaran

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				(Rp)	%
1.	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	22.758.645.000	3.850.345.442	16,92
2.	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	406.200.000	18.860.300	4,64
3.	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	622.564.000	20.810.000	3,34
4.	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	657.000.000	39.154.719	5,96
5.	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	16.693.554.000	2.646.267.498	15,85
<b>Total</b>			<b>41.137.963.000</b>	<b>6.575.437.959</b>	<b>15,98</b>

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak pada Tahun 2023 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440847/2023 tanggal 18 November Tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.137.963.000,- (Empat Puluh Satu Miliar Seratur Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Berdasarkan data dari OMSPAN sampai tanggal 31 Maret tahun 2023 dimana realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak sebesar 15,98% atau sebesar Rp. 6.575.437.959,- (Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Capaian anggaran yang mencapai tergolong rendah karena dibawah dari 20% hal ini disebabkan akselerasi pelaksanaan kegiatan dengan alokasi anggaran yang besar yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana penarikan dana.kapal pengawas dan speedboat juga masih belum melakukan gelar operasi pada bulan januari. Adanya Penyesuaian teknis pengawasan SDKP terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Perdirjen PSDKP No.06 tahun 2021. Penyesuaian jadwal pengawasan berbasis OSS lingkup Stasiun PSDKP Pontianak pada Triwulan I Tahun 2023 juga belum optimal sehingga belum maksimalnya penggunaan anggaran melalui koordinasi bersama para pengelola anggaran baik yang ada di Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak maupun Satwas SDKP di Bawahnya. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang secara langsung berkontribusi dalam serapan anggaran dilakukan secara reguler oleh seluruh perangkat Stasiun pengawasan SDKP Pontianak Rician serapan anggaran tiap bulan dalam periode Triwulan I Tahun 2023.



#### 4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Pontianak Triwulan I Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Pontianak pada periode Triwulan I tahun 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.
2. Dari 22 Indikator kinerja Keseluruhan sebanyak 11 (sebelas) Baik Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial yang dilakukan pengukuran pada Triwulan I dan dapat mencapai target dengan nilai capaian sasaran 107,02%.

#### 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja Stasiun PSDKP Pontianak pada triwulan I Tahun 2023, maka untuk triwulan berikutnya perlunya peningkatan capaian dalam waktu yang sedini mungkin mempertimbangkan asas akuntabilitas. Selain itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan menjadi perbaikan pada periode berikutnya dapat jelaskan pada pada tabel berikut:

Tabel 28. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil capaian

No	Hal yang Harus Menjadi perhatian	Permasalahan	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Akuntabilitas Keuangan	Nlai realisasi anggaran belum mencapai target dengan capaian sebesar 15,98%	Meningkatkan realisasi anggaran pada Triwulan berikutnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Maksimalkan kegiatan operasi armada</li><li>- Memaksimalkan kegiatan OPPP</li></ul>

## LAMPIRAN. PERJANJIAN KINERJA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdul Quddus**  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

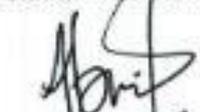
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

  
Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

  
Abdul Quddus

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b>				
1.1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	1.1.1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (Indeks)	80
1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	1.2.1	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	87,6
		1.2.2	Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	87,6
1.3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	1.3.1	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP (%)	100
<b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>				
2.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan	2.1.1	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (%)	100
<b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>				
3.1	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan yang Sesuai Ketentuan	3.1.1	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (%)	100
<b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	4.1.1	Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	80
4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	4.2.1	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (%)	93
<b>KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP</b>				
5.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	5.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		5.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPi (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	80
		5.1.3	Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (nilai)	75
		5.1.4	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	
		5.1.5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Indeks)	78
		5.1.8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	90
		5.1.7 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		5.1.8 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	21
		5.1.9 Jumlah Inovasi yang Dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak (Inovasi)	1
		5.1.10 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	92
		5.1.11 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		5.1.12 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (%)	77,5
		5.1.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	89
		5.1.14 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak (Nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	622.564.000
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	657.000.000
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	22.758.645.000
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	406.200.000
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	16.693.554.000
<b>Total Anggaran</b>		<b>41.137.963.000</b>

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak



Abdul Qudus